



gerakan politik yang disebut-sebut dengan Neo-Masyumi. Tetapi hal ini adalah sebuah gerakan Islam kultural. Jadi di Indonesia telah terjadi perubahan metode perjuangan ummat Islam, dari gerakan politik ke gerakan kultural.

Dan, gerakan kultural itu adalah

satu gerakan Islam yang pengembangannya tidak lagi didasarkan pada primordialisme keislaman atau kepartaian, tetapi mengarah pada bagaimana menampilkan Islam di pentas permasalahan nasional seperti masalah keadilan, kesejahteraan rakyat, kemiskinan penduduk, dsb.

*Jadi bagaimana sebetulnya posisi tuduhan-tuduhan itu?*

Itu semacam kecemburuan sekaligus kekhawatiran jangan-jangan kesempatan ummat Islam di pemerintahan Indonesia itu dijadikan untuk kepentingan primordialisme. Tuduhan itu tidak realistis, sebab dengan tuduhan itu seakan-akan keberadaan Islam itu harus dicurigai.

Padahal, semua yang mereka (ummat Islam) perjuangkan itu sebetulnya untuk kepentingan nasional. Dan itu sebuah prestasi dalam meningkatkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

*Jadi, apa sebetulnya yang harus dikembangkan dalam perkembangan politik di Indonesia ini?*

Yang perlu dikibarkan dan diisytukan sekarang ini adalah *fair political play*, yaitu kegiatan atau persaingan politik yang lebih fair. Dan, *clean political play* (permainan politik yang bersih). Itu kan pendukung adanya *clean government* (pemerintahan yang bersih) yang dicita-citakan.

Itulah sebetulnya yang saat sekarang ini diperlukan. Bukan malah menghembuskan isu-isu kecurigaan yang dilandasi dengan kecemburuan seperti isu adanya Masyumi Baru. Isu-isu seperti itulah yang sebetulnya dapat menjadi faktor pemecah belah. Dengan demikian, isu itu timbul dari orang-orang yang menginginkan perpecahan.

Jadi, selama masih berkepentingan nasional, walaupun datangnya dari mana saja dapat diterima. Jelasnya, semua golongan itu sebetulnya mendapat tempat yang sama jika sudah menyangkut permasalahan nasional.

Dan, jika dibanding-bandingkan dulu dan sekarang, dulu persaingan politik atas nama primordial itu wajar karena dulu sistemnya parlementer dengan mengembangkan *multi party system* (sistem banyak partai). Tetapi sekarang, kita menganut sistem presidensiil yang tidak mengembangkan sistem multi partai itu. Dan yang penting sekarang adalah memecahkan permasalahan-permasalahan bangsa, bukan masanya lagi untuk gontok-gontokan yang dapat merugikan kita semua. ■MT

# NATSIR, Masyumi dan Ideologisasi Islam

Berbicara tentang Masyumi, sulit memisahkannya dengan Mohammad Natsir, mengingat ijhtihad politiknya yang banyak mewarnai partai Islam yang dikenal gigih anti Komunis itu. Inilah catatan **Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH**, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara FHUI (Fakultas Hukum Universitas Indonesia) yang tengah menyelesaikan bukunya tentang Masyumi yang bubar pada zaman kejayaan Orde Lama.

**I**DEOLOGISASI terhadap asas-asas doktrin keagamaan Islam yang berkenaan dengan kehidupan sosial dan politik, membawa Natsir untuk mempertemukan antara Islam dengan paham demokrasi liberal yang berkembang luas di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Pandangannya mengenai demokrasi ini menunjukkan adanya perkembangan dari waktu ke waktu. Sejalan dengan kejayaannya bahwa negara pada prinsipnya adalah "alat" untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh agama, Natsir berpendapat tidak ada suatu model tertentu yang bersifat "baku" mengenai sebuah negara sebagaimana dikehendaki oleh Islam.

Kaum Muslimin yang hidup pada sesuatu zaman dan tempat tertentu di dunia ini, bebas untuk menyusun negara mereka sendiri menurut cara-cara yang sesuai dengan keadaan mereka. Mereka pun berhak untuk mencontoh berbagai sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh bangsa-bangsa lain, meskipun mereka bukan bangsa Muslim.



Menurut Natsir, prestasi sebuah peradaban tidaklah semata-mata menjadi hak milik mutlak masyarakat yang melahirkannya. Bangsa-bangsa lain berhak pula untuk menikmati penemuan-penemuan masyarakat lain bagi kepentingan dan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.

Pada tahun 1940, ketika Natsir masih muda dan menjadi aktivis pergerakan sosial dan politik di masa penjajahan, dia menganjurkan cara yang liberal dalam menyusun sebuah negara (Indonesia) di masa yang akan datang. "Ummat Islam", katanya, boleh mencontoh sistem-sistem pemerintahan yang ada di negara-negara lain seperti Inggris, Finlandia, Jepang, Bahkan Rusia, jika mereka menilai sistem-sistem itu dapat mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Islam.

Natsir memang mengingatkan agar kaum Muslimin jangan sekadar mencontoh saja secara membabi buta tanpa penilaian kritis terhadap berbagai pemerintahan yang telah ada itu. Contoh negara-negara yang disebutkan Natsir itu tampaknya amat liberal, karena Jepang di masa itu adalah sebuah negara totaliter berhaluan fasis. Sedangkan Rusia adalah sebuah negara komunis.

Contoh-contoh itu sengaja ditunjukkan olehnya, semata-mata

ingin memperlihatkan bahwa doktrin politik Islam itu bersifat terbuka untuk beradaptasi dengan sistem-sistem pemerintahan yang telah ada di dunia ini.

Natsir lebih tertarik untuk mengadaptasikan asas-asas sosial dan politik di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi dengan paham demokrasi liberal seperti dipraktekkan di Eropah dan Amerika Serikat.

Dia berpandangan, dasar-dasar politik Islam sebenarnya menghendaki sebuah sistem yang demokrasi liberal. Perbedaannya hanya terletak pada garis panduan untuk dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan politik, hukum dan berbagai keputusan politik lainnya.

#### Demokrasi Islam

Dalam demokrasi Islam, perumusan kebijakan politik, ekonomi, hukum dan lain-lainnya haruslah mengacu kepada asas-asas yang telah

ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Atau sekurang-kurangnya kebijakan-kebijakan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip doktrin.

Karena adanya acuan tertentu di dalam membuat keputusan-keputusan politik itulah, maka pada mulanya Natsir mengatakan Islam itu "tidak demokrasi 100%". Ini disebabkan karena keputusan politik tidaklah semata-mata harus didasarkan kepada kemauan mayoritas anggota-anggota Parlemen.

Keputusan itu, tidak dapat melampaui hudud (batas-batas) yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Pada tahun 1957, dalam perdebatan mengenai dasar negara di Majelis Konstituante, Natsir menamakan demokrasi di dalam Islam dengan istilah "Theistic Democracy", yaitu demokrasi yang dilandaskan kepada nilai-nilai ketuhanan.

Hudud yang disebutkan oleh Natsir itu bukanlah sistem penghukuman dalam hukum pidana Islam seperti ditafsirkan oleh golongan alim-ulama berpaham tradisional, melainkan "prinsip-prinsip moral universal" yang akan menjamin tegaknya nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Jadi, dia menafsirkan hudud itu hampir serupa dengan konsep "natural law" seperti dipahami Thomas Aquinas. Bagi Aquinas tidak akan ada norma-norma hukum yang akan mempunyai kekuatan untuk berlaku, jika ia berlawanan dengan "natural law" sebagai norma moral yang universal.

Pandangan Natsir bahwa demokrasi yang dikehendaki oleh Islam adalah hampir serupa dengan sistem demokrasi liberal, kecuali panduan dalam mengambil keputusan-keputusan politik seperti dikatakan di atas, didasarkan kepada interpretasinya atas konsep ijtihaad, syura dan ijma.

Ijtihaad dilihat oleh Natsir sebagai suatu keharusan mutlak bagi menghadapi Islam dengan dinamika perubahan masyarakat. Tanpa ijtihaad, doktrin sebagaimana ditafsirkan serta diwariskan oleh tradisi di masa yang silam akan kehilangan relevansinya dengan problema dunia masa kini.

Ijma, secara tradisional diartikan sebagai "kesepakatan alim-ulama fiqih tentang kualifikasi hukum dari suatu perkara yang tidak tegas penentuan hukumnya, baik di dalam al-Qur'an maupun di dalam Sunnah Nabi". Natsir melihat ijma sebagai kesepakatan mayoritas kaum Muslimin pada suatu tempat dan suatu zaman tertentu terhadap masalah-masalah bersama yang mereka hadapi dengan berpandu kepada asas-asas doktrin di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Konsep ijtihaad dan ijma, jika dihubungkan dengan konsep syura yang disebutkan di dalam al-Qur'an, menurut Natsir, dapat diwujudkan ke dalam bentuk sebuah parlemen yang anggota-anggotanya dipilih oleh seluruh rakyat. Mereka yang menerima amanah dari seluruh rakyat itu, dengan berpandu kepada asas-asas doktrin, dapat membuat berbagai kebijakan politik, hukum dan keputusan suara mayoritas.

Landasan pandangannya ialah, salah satu hadits Nabi Muhammad yang terkenal di kalangan kaum modernis, yaitu "ummatku selamanya tidak akan pernah bersepakat di dalam kesalahan". Dengan alasan-alasan ini, pemikiran modernisme Islam yang dianut Natsir, memang mempunyai kesamaan-kesamaan dengan tokoh-tokoh pendahulunya seperti Tjokroaminoto dan Agus Salim, maupun tokoh-tokoh moder Muslim di negeri lain seperti Mohammad Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah di India (dan kemudian, Pakistan).



*Dia yakin, asas-asas Islam itu jika ditafsirkan dengan cara yang wajar, akan membawa kaum Muslimin kepada kemodernan tanpa harus terjerumus kepada westernisme dan sekularisme. Namun corak pemikiran adaptif dan akulturatif dengan kemodernan itu bukannya tanpa risiko dan tanpa kesulitan untuk menjalankannya di dalam realitas sebuah masyarakat Muslim.*



## Adaptasi Gagasan

Dengan cara melakukan adaptasi antara asas-asas doktrin sosial dan politik Islam dengan gagasan-gagasan modern mengenai demokrasi di negeri-negeri Barat itu sebagai suatu contoh, dapat dimengerti berbagai ucapan Natsir, bahwa "seorang Muslim tidak perlu menjadi seorang sekular terlebih dahulu, untuk menjadi orang modern".

Dia yakin, asas-asas Islam itu jika ditafsirkan dengan cara yang wajar, akan membawa kaum Muslimin kepada kemodernan tanpa harus terjerumus kepada westernisme dan sekularisme. Namun corak pemikiran adaptif dan akulturatif dengan kemoderanan itu bukannya tanpa risiko dan tanpa kesulitan untuk menjalankannya di dalam realitas sebuah masyarakat Muslim.

Bagi kelompok "fundamentalis", pemikiran politik kaum modernis hampir tidak banyak bedanya dengan pemikiran-pemikiran sekular. Modernisme politik Islam hanyalah membungkus gagasan-gagasan politik Barat dengan baju Islam yang pada intinya tetap sekular, dan tidak "orsinil" berasal dari Islam.

Risiko itu -seperti kritik kelompok fundamentalis- di antaranya ialah, demokrasi yang bercorak akulturatif itu, akan mudah membawa kepada liberalisme tanpa menjadikan asas-asas doktrin sebagai pedoman dalam membuat keputusan-keputusan politik. Namun semata-mata berasas kepada kekuatan politik golongan mayoritas.

Kesukaran pelaksanaannya ialah terdapatnya kebebasan bagi rakyat untuk membentuk partai-partai politik berdasarkan ideologis-ideologi yang berbeda. Ini memang konsekuensi yang wajar dari sistem demokrasi yang juga disokong oleh Natsir.

Kebebasan membentuk partai-partai itu, adalah seperti realitas Indonesia sendiri di masa itu, di mana terdapat partai berideologi Islam, Nasionalisme Sekuler, Komunis, Sosialis serta partai-partai berasaskan agama-agama lain seperti Partai Katolik dan Partai Kristen.

Bagaimanakah caranya partai-partai dengan ideologi yang berbeda itu akan sudi untuk berpedoman kepada asas-asas doktrin politik Islam dalam membuat keputusan-keputusan politik? Natsir tidak memberikan jalan keluar dari kesulitan ini, sebagaimana juga tokoh-tokoh modernis yang lain seperti Iqbal dan Ali Jinnah.

Sebagai seorang politikus yang menjadi ketua sebuah partai politik Islam, dan seorang pemegang kekuasaan politik, atau bahkan dalam kedudukannya sebagai seorang tokoh oposisi, Natsir seringkali terpaksa harus berkompromi dengan realitas politik yang dihadapinya. Atau juga, kadang-kadang ia terpaksa harus mengemukakan suatu pendirian politik yang

dilatarbelakangi oleh kekhawatiran-kekhawatiran tertentu.

## Khawatirkan Kediktatoran

Di samping soal keyakinan Natsir terhadap kebaikan-kebaikan sistem demokrasi yang dilihatnya juga sebagai suatu sistem yang sejalan dengan kesadaran batin manusia, pembelaan Natsir terhadap demokrasi dilatarbelakangi juga oleh kekhawatirannya terhadap kemungkinan munculnya diktatorisme di Indonesia, baik oleh Soekarno yang ketika itu menjadi Presiden konstitusional, atau oleh golongan komunis yang memang merupakan saingan utama, bahkan musuh utama Partai Masyumi yang dipimpinnya.

Secara pribadi, Natsir adalah seorang anti-komunis yang tegas. Ini memang mendapat dorongan dari keyakinan keagamaan yang dianutnya. Sikap anti-komunismenya itu tampak dari berbagai kecaman yang dilontarkannya kepada PKI. Ia seakan-akan tidak mengenal henti mengingatkan rakyat terhadap bahaya komunisme. Ia mengingatkan rakyat terhadap kemungkinan munculnya kediktatoran yang akan berjalan jika golongan komunis diberi kesempatan memegang kekuasaan politik.

Peringatan seperti itu dilontarkannya jauh-jauh sebelum kebanyakan pemimpin politik dan militer Indonesia akhirnya menyadari bahaya komunisme setelah terjadinya Peristiwa Gerakan 31 September 1965. Kekhawatiran terhadap kemungkinan Soekarno menjadi diktator dengan sokongan golongan komunis, yang pada

akhirnya akan menguntungkan golongan

yang disebutkan terakhir ini,

menjadi sebab utama oposisi Natsir

terhadap gagasan "demokrasi terpimpin" yang

dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957.

Ketika itu Soekarno mulai mengecam sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia sebagai "demokrasi liberal" yang diimpor dari Barat dan ternyata, menurutnya, tidak sesuai dengan jiwa dan keiribadian bangsa Timur.

Demokrasi Timur, menurut Soekarno, tidak mengenal adanya "oposisi", karena semua golongan di dalam masyarakat adalah ibarat sebuah keluarga yang "alle leden de familie aan tafel, aan de eettafel, en aan de werktafel" (semua keluarga diajak menghadap meja yang sama, makan di meja makan yang sama, dan bekerja di meja kerja yang sama pula).

Demokrasi seperti itu, kata Soekarno adalah "demokrasi bangsa





Timur", yaitu "demokrasi gotongroyong" berasaskan prinsip kekeluargaan. Belakangan Soekarno memberi nama demokrasi seperti itu sebagai "demokrasi terpinpin" (demokratie met liderschap), yaitu demokrasi yang "dipimpin oleh hikmah-kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Natsir menentang keras gagasan demokrasi terpinpin. Apalagi Soekarno kemudian mengemukakan niatnya untuk "menguburkan" partai-partai politik sebagai bagian integral dari aplikasi demokrasi terpinpin yang tidak mengenal oposisi itu.

Demokrasi, kata Natsir, selamanya harus menjamin kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan menyatakan sikap tidak setuju secara terbuka dan jujur tanpa rasa takut dan khawatir. Jadi, selama ada demokrasi, selama itu pula oposisi akan tetap ada.

Demokrasi dengan pengakuan kebebasan menyatakan pendapat itu, menurut Natsir, adalah bersifat universal. Sebab itu, dia tidak melihat adanya apa yang disebut oleh Soekarno sebagai "demokrasi Barat" atau "Demokrasi Timur", karena apa yang ada di dunia ini, hanyalah "demokrasi" atau "bukan demokrasi".

Jadi, "demokrasi terpinpin" yang tidak mengenal perbedaan pendapat dan oposisi itu adalah "bukan demokrasi". Kalau demikian, kata Natsir, demokrasi terpinpin tidak lain adalah "sistem diktator".

Apalagi, jika partai-partai politik "dikuburkan" seperti keinginan Soekarno. Selama ada demokrasi, menurut Natsir, selama itu pula partai-partai akan tetap ada. Jika partai-partai itu sampai dikuburkan, maka yang akan tegak berdiri di atas kuburan itu tidak lain adalah sebuah batu nisan kediktatoran.

### Perubahan Damai

Natsir bukannya tidak menyadari adanya sisi-sisi lemah dari demokrasi itu sendiri. Namun, dengan mengutip pendapat Radakhrisnan, ia mengatakan bahwa sampai dengan perkembangan peradaban yang mutakhir, manusia belum menemukan adanya sistem lain yang lebih baik dari demokrasi.

Walaupun mempunyai sisi-sisi kelemahan, demokrasi jauh lebih baik dari sistem diktator, walapun proses demokratis seringkali terkesan lamban dan tampak kurang "heroik". Demokrasi, memungkinkan dicapainya perubahan-perubahan revolusioner melalui sebuah proses yang damai.

Tampak jelas sekali kekhawatiran Natsir terhadap kemungkinan Soekarno akan menjadi diktator dengan demokrasi terpinpin yang tidak mengenal oposisi itu. Kekhawatiran yang lain, yang tidak kalah pentingnya, ialah, dengan penerapan demokrasi terpinpin itu, berarti golongan komunis juga akan ikut di dalam kabinet "gotong royong" yang menganggap semua golongan sebagai satu "keluarga" itu.

Bagi Natsir, gagasan Soekarno ini adalah gagasan yang absurd, karena bagi golongan Islam yang diwakili Natsir, golongan komunis, disebutnya sebagai "serigala berbulu domba" yang "hendak dimasukkan oleh Presiden (Soekarno) ke dalam satu kandang bersama-sama hewan ternak yang lain".

Semakin nyata gagasan demokrasi terpinpin dilaksanakan oleh Soekarno, semakin keras pula pembangkangan Natsir. Ketika semua jalan yang dianggapnya patut ditempuh untuk menentang "kediktatoran Soekarno" tidak lagi membawa hasil, dia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan tokoh-tokoh panglima militer di Sumatra. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia

yang dibentuk oleh kaum pembangkang di Sumatera, akhirnya membawa kepada perang saudara di Indonesia antara dua kelompok yang berlawanan itu.

Tetapi semakin tua dan semakin jauh dia meninggalkan arena pertarungan politik secara langsung, semakin banyak pula perubahan pandangannya mengenai demokrasi. Pada tahun 1976, dia mengatakan bahwa hakikat demokrasi sebenarnya tidaklah semata-mata terletak kepada bentuk struktural dari sebuah negara.

Intisari demokrasi, menurutnya, terletak pada "keyakinan yang murni terhadap martabat orang-seorang". Oleh karena itu, sukses sebuah demokrasi tidaklah dapat diukur dengan berapa kali diadakan pemilihan umum, tetapi mestilah dinilai dengan "ukuran-ukuran tentang seberapa jauh tindakan-tindakan dan kelakuannya itu sesuai dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan menambah martabat manusia sebagai orang seorang".

Namun, Natsir tetap yakin bahwa interpretasi paling modern tentang demokrasi itu, sebenarnya dapat ditemukan di dalam Islam yang bertitik tolak dari nilai-nilai kerohanian, etika pribadi dan sosial yang tinggi, serta penghormatan kepada harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan pandangan di atas itu, dapat difahami mengapa Natsir seringkali melahirkan kritik terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia sampai menjelang akhir hayatnya.

Meskipun dia tidak lagi mempunyai kepentingan (interest) politik bagi kepentingan pribadinya, atau sesuatu partai tertentu (Partai Masyumi sendiri yang dipimpin oleh Natsir telah dibubarkan pada tahun 1960), namun dia haruslah diakui sebagai seorang yang penuh kejujuran melakukan kritik demi memperbaiki kehidupan politik di negara ini.

Walau kadang-kadang, kritik dan nasihatnya itu, terntu saja membuat beberapa pihak merasa tidak gembira. Hal itu mungkin pula harus dilihat sebagai konsekuensi lain dari sistem demokrasi yang diperjuangkannya selama sebagian besar masa hidup yang dijalannya. ■



**Bagi Natsir, gagasan Soekarno ini adalah gagasan yang absurd, karena bagi golongan Islam yang diwakili Natsir, golongan komunis, disebutnya sebagai "serigala berbulu domba" yang "hendak dimasukkan oleh Presiden (Soekarno) ke dalam satu kandang bersama-sama hewan ternak yang lain".**